

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wabah virus corona pertama kali mulai terdeteksi di Wuhan, China pada akhir tahun 2019. Dan WHO menyatakan wabah penyakit tersebut sebagai pandemi dan mulai masuk ke Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Dimumkan oleh Presiden melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana berdasarkan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2007 bahwa Corona Virus atau Covid-19 sebagai bencana nasional sejak tanggal 14 Maret 2020. Dari pandemi sangat berdampak di berbagai sector dan yang paling berpengaruh adalah sector kesehatan masyarakat yang renta. Berdasarkan pengertian dari WHO covid19 merupakan sebuah penyakit yang bersifat menular dan disebabkan dari virus SARS-CoV2. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. maka untuk mengurangi penyebaran penularan Covid 19 salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan isolasi diri dengan tujuan mencegah supaya yang sakit tidak bertemu dengan orang yang sehat sehingga tidak terjadi penularan, Isolasi sifatnya bisa aktif dan juga bisa pasif, bagi orang yang sadar bahayanya Covid 19 maka dia akan mengisolasi dirinya tapi kalau orang tersebut tidak mengerti bahayanya Covid 19 maka perlu peraturan pemerintah yang tegas bagaimana cara agar orang seperti ini tidak keluar dari rumah atau di isolasi di rumah (Ernawati, S.Kep.,Ns.M.Kes:2020)

Berdasarkan peraturan UU No 6 th 2018 tentang karantina kesehatan menyatakan bahwa Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan

seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, Alat Angkut, atau Barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau Barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau Barang di sekitarnya. Sedangkan isolasi merupakan pemisahan orang sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.

Namun disisi lain mengadaan karantina kesehatan ataupun isolasi secara mandiri masih belum dapat untuk dipenuhi secara maksimal hal ini dikarenakan kurangnya fasilitas yang memadai hal tersebut dikawatirkan dapat memunculkan klaster covid-19 yang baru. Masyarakat masih banyak yang tidak paham dengan isolasi mandiri terutama ketika mereka memiliki riwayat kontak dengan kasus positif, baru pulang atau berpergian dari luar kota, memiliki gejala serupa COVID-19 sehingga masih saja berkontak dengan anggota keluarga lainnya (Wirna Putri, 2020). Maka dengan itulah dibangun beberapa *shelter* covid diberbagai kabupaten hinga kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul nomor 6 tahun 2021 tentang kewajiban karantina atau isolasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan corona virus disease 2019. Menyatakan bahwa *Shelter* adalah bangunan fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kalurahan digunakan untuk penanganan Covid-19 sebagai tempat isolasi. Isolasi *Shelter* Kalurahan

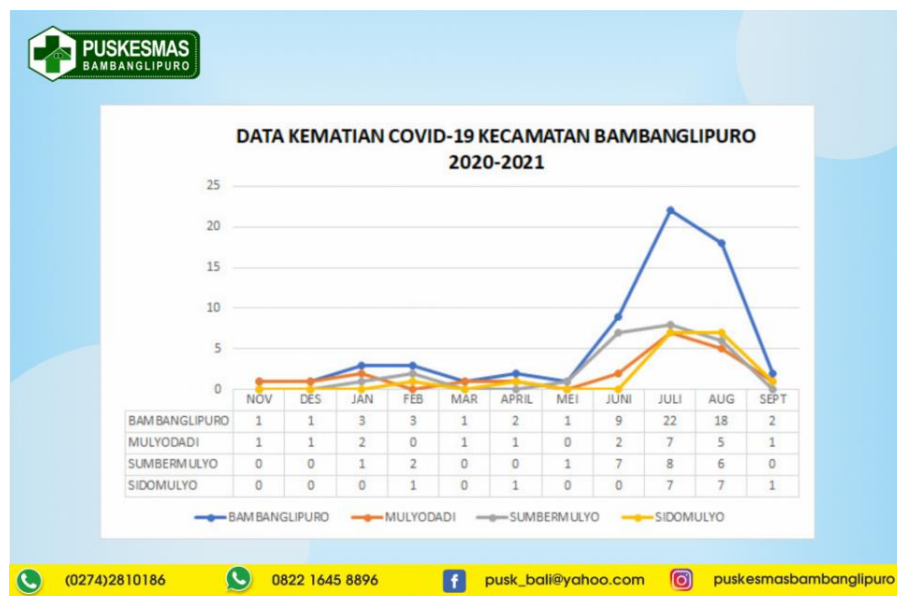
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Sedangkan Isolasi rumah sakit dan *Shelter* Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Maka dengan adanya Peraturan Bupati Bantul No 6 th 2021 tentang kewajiban karantina atau isolasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan corona virus disease 2019 pemerintah Desa Sumbermulyo juga berpartisipasi penyediaan *Shelter* Covid-19. Di desa Sumbermulyo sendiri terdapat 2 Shelter covid yang mana yang pertama adalah shelter semaul yang mana awalnya dikelola oleh Desa Sumbermulyo namun kemudian di ambil alih oleh dinas kesehatan kabupaten Bantul sedangkan shelter satunya dikelola langsung oleh pemerintah Kalurahan Sumbermulyo.

Kalurahan Sumbermulyo sendiri menjadi desa percontohan penanganan covid 19 terbaik se kabupaten Bantul. Status ini diberikan dari Menteri kesehatan ketika mengunjungi Kalurahan sumbermulyo pada bulan Maret tahun 2021 menurut nya peran atau pemanfaatan shelter desa ini sangat berpengaruh terhadap penekanan covid 19 di Kalurahan Sumbermulyo sehingga hal tersebut layak untuk dijadikan sebagai *pilot project* percontohan penanganan Covid-19 tingkat nasional (Kemkes.go.id). Kalurahan Sumbermulyo sendiri juga merupakan Kalurahan di kabupaten Bantul yang pertama kali mendirikan shelter covid 19 yaitu sejak April tahun 2020 namun pada saat itu shelter Kalurahan Sumbermulyo masih menggunakan bangunan milik kabupaten, namun ketika di tahun 2021

shalter Kalurahan Sumbermulyo berpindah di lokasi lain yang mana sudah memiliki lokasi milik desa sendiri . Disisi lain desa Sumbermulyo juga merupakan desa dengan kasus kematian covid yang tinggi di Kecamatan Bambanglipuro . dimana di sepanjang tahun 2020 sampai dengan bulan September th 21 tercatat kematian covid yaitu 25 kematian.

Tabel 1.1 Data Kematian Covid 19 Kapanewon Bambanglipuro



Maka dengan adanya kebijakan Shelter di Kalurahan Sumbermulyo tersebut diharapkan semua pasien covid 19 secepat dan bersedia untuk masuk agar dengan mudah di pantau oleh petugas kesehatan. Namun apabila pasien covid mengalami gejala berat maka petugas akan bisa langsung untuk merujuk kerumah sakit karena shalter covid hanya digunakan untuk pasien yang bergejala ringan saja.

Untuk bangunan Shelter Sumbermulyo ini Sendiri mampu untuk menampung sekitar 50 orang pasien covid. Tempat isolasi ini juga dilengkapi oleh

fasilitas yang memadai seperti oksigen, alat cek kesehatan seperti saturasi oksigen serta pengukuran suhu tubuh dan tensi, relawan yang berjaga selama 24 jam dan yang terakhir adalah bantuan logistic berupa makan 3 kali(bantulkabgo.id:2021). Serta guna memudahkan koordinasi pemerintah Kalurahan Sumbermulyo juga memberikan grup wa yang berisikan pejabat pemrintah desa, tenaga Kesehatan, hingga para pasien yang bersangkutan. Untuk lokasi Shalter Covid Tangguh Sumbermulyo bertempat pada bangunan sekolahan serta jauh dari pemukiman warga desa Sumbermulyo.

Untuk system perencanaan shelter ini diperuntukkan bahwa setiap warga desa Sumbermulyo yang terpapar covid dan bergejal ringan harus wajib untuk melakukan isolasi di shelter. Sehingga hal tersebut dapat memisahkan antara warga yang terpapar covid- 19 dengan lingkungan mereka. Serta berdasarkan berita yang diterbitkan oleh Kominfo.go.id menyatakan bahwa dengan adanya kebijakan dari pemerintah pusat terkait dengan isolasi Terpusat atau isoter untuk setiap wilayah kecamatan serta kalurahan karena tanpa adanya isolasi terpusat kecepatan penularan covid-19 diwilayah penduduk diyakini bisa terjadi secara cepat dan masif. Yang mana hal tersebut diharapkan dapat untuk mengurangi resiko penularan serta serta memutus laju penyebaran covd19 di Kalurahan Sumbermulyo.

Shelter kalurahan Sumbermulyo dalam melaksananya didukung dua pihak yaitu pemerintah serta pihak swasta. Untuk pihak pemerintah sendiri ditunjang oleh dana desa serta bantuan dari Dinas Sosial sedangkan pihak swasta dari berbagai sumbangan NGO ataupun yayasan yang terdapat di Kalurahan Sumbermulyo ataupun diluar desa . Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat juga begitu antusias membantu terlaksanan shelter covid di kalurahan Sumbermulyo yang mana hal tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat Desa Sumbermulyo sangat bersungguh dalam penanganan covid

Tabel 1.2 Data Konfirmasi Positif Covid-19 Kalurahan Sumbermulyo Bulan Januari-Oktober 2021

| No | Bulan | Jumlah masuk Shelter | Jumlah kasus |
|-------------------------------|-----------|----------------------|--------------|
| 1 | Januari | 10 | 20 |
| 2 | Februari | 16 | 25 |
| 3 | Maret | 19 | 59 |
| 4 | April | 20 | 21 |
| 5 | Mei | 35 | 59 |
| 6 | Juni | 56 | 109 |
| 7 | Juli | 51 | 528 |
| 8 | Agustus | 71 | 256 |
| 9 | September | 0 | 21 |
| 10 | Oktober | 0 | 3 |
| Total th 21 | | 278 | 1101 |
| Total kasus covid Sumbermulyo | | 1187 | |

Data table 1.2 tersebut merupakan data konfirmasi kasus positif Covid serta pasien yang melakukan isolasi di shelter Tangguh Sumbermulyo yang mana di mulai pada bulan Januari- Oktober 2021. Dari data tersebut dapat dilihat terjadi pasang surut yang signifikan pada kasus covid di Kalurahan Sumbermulyo. Dalam kurun waktu 9 bulan telah terjadi kasus covid sebesar 1081 jiwa. Dan jika kita melihat jumlah kesuruhan kasus covid dari awal muncul pada tahun 2020 sampai dengan dengan bulan oktober tahun 2021 sekarang adalah sebanyak 1187 jiwa, yang mana hal tersebut melitahkan bahwa mulainya tahun 2021 terjadi lonjakan kasus covid yang begitu tinggi di Kalurahan Sumbermulyo. Shelter covid-19 sendiri di Kalurahan sumbermulyo dibangun sejak awal tahun 2021 yaitu bulan Januari.

Namun dengan melihat data covid pada tahun 2021 yang lebih tinggi dari pada tahun 2020 serta juga sudah adanya kebijakan penyediaan shelter di Kalurahan Sumbermulyo pada tahun 2021 mengindikasikan apakah shelter covid tersebut belum efektif dalam memutus rantai penyebaran covid19. Karena sepanjang tahun 2020 hanya terdapat 106 kasus covid di Kalurahan Sumbermulyo sedangkan di tahun 2021 periode bulan Febuari- Oktober malah mencapai 1101 kasus covid.

Di lihat dari data tesebut sepanjang bulan Januari sampai bulan oktober antara jumlah kasus covid serta yang menjalankan isolasi di shelter tidak seimbang. Yang mana hal tersebut bisa dikatakan masyarakat lebih memilih melakukan isolasi secara mandiri atau lebih memilih isolasi di sehalter yang lain. Total jumlah kasus covid di desa Sumbermulyo pada periode januari-oktober

sebanyak 1101 sedangkan yang melakukan isolasi shelter hanya 278 jiwa saja. Serta di dua bulan terakhir shelter di kalurahan Sumbermulyo sudah tidak beroperasi disisi lain berdasarkan data tersebut bulan September dan oktober masih terdapat laju kasus covid di Kalurahan Sumbermulyo.

Maka dengan hal tersebut merupakan sebuah masalah yang menarik untuk kita kaji lebih lanjut yaitu karena dibentuknya shelter adalah untuk mengurangi laju penularan covid ataupun memutus kalster covid namun setelah adanya shelter pun kasus covid malah tetap semakin tinggi serta shelter berhenti beroperasi disislain masih terdapat kasus covid. Maka dalam penelitian akan mencoba meilihat evaluasi terkait dengan penyediaan shalter Kalurahan Sumbermulyo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan . Maka yang di teliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut *Bagaimana Kebijakan Pemerintah Kalurahan Sumbermulyo Dalam Penyediaan shelter Sebagai Pencegahan dan Penanganan dalam Upaya Memutus rantai Penyebaran Covid-19 ?*

C. Tujuan Penelitian

Melihat dari rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana evaluasi kebijakan Pemerintah Desa Sumbermulyo dalam penyediaan shelter sebagai upaya memutus rantai penyebaran Covid-19 di tahun 2021.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

1. Memberikan tambahan wawasan dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat meningkatkan pengetahuan penulis dalam aplikasi dan teori
2. Diharapkan dapat menambah refrensi kepustakaan bagi mahasiswa

2. Manfaat Praktis

1. Sebagai acunan bagi pemerintah Kaluarahn terkait dengan keberhasilan dalam menanggulangi pandemic cocid 19 sehingga diharapkan tidak menimbulakn kalster klaster covid baru .

2. Untuk mengetahui keberhasilan kebijakan maupun program yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Sumbermulyo.

E. Studi literature

Berikut akan dijelaskan beberapa tinjauan pustaka yang diambil dari hasil penelitian terdahulu. Kajian pustaka yang dijelaskan tentunya memiliki pembahasan yang berkaitan dengan latar belakang masalah pada penelitian ini yaitu berupa penanganan covid 19 yang dilakukan oleh pemerintah Desa. Beberapa tinjauan pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut :

Penelitian Terdahulu

| No | Nama Penulis | Judul Penelitian | Hasil penelitian |
|----|----------------|---|--|
| 1 | (Wonok, 2020) | Strategi Pemerintah Desa dalam Pencegahan Penyebaran virus corona (COVID-19) (Studi di Desa Mokobang Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan) | Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa strategi pemerintah desa Monokobang dapat dikatakan dengan kategori baik. Beberapa strategi yang mendukung hal tersebut adalah salah satunya memanfaatkan kemampuan yang dimiliki oleh desa Mokobang, baik yang berasal dukungan dari pemerintah pusat dan daerah yang salah satunya adalah kemampuan anggaran desa melalui dana desa yang dimanfaatkan untuk BLT Dana desa dan operasional pembelian peralatan pencegahan penyebaran covid 19. Selain itu strategi yang juga mendukung adalah dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah desa, baik dari sisi staf yakni perangkat desa, informasi, kewenangan dan fasilitas. Keempat sumberdaya tersebut menjadi andalan dari pemerintah desa dalam rangka pencegahan penularan covid 19 di desa Mokobang, |
| 2 | (Nayoan, 2020) | kebijakan Pemerintah dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 di Desa Pontak Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan | Dari jurnal ini mengatakan bahwa kebijakan pemerintah Desa Pontak dalam menghadapi pandemic belum berhasil secara maksimal. Hal ini didorong karena kurangnya sumberdaya manusia yang memadai. Sehingga pemerintah Desa Pontak kewalahan dalam menghadapi pandemic covid tersebut. Pemerintah |

| | | | |
|---|-------------------------|---|---|
| | | | Desa Pontak juga dalam melakukan pengelolaan anggaran Covid-19 tidak secara transparan sehingga tafsiran publik berbeda dengan infografi APBDes. |
| 3 | (Faisal, 2020) | Desa Labbo Melawan Covid-19: Kebijakan Penanggulangan dan Kepatuhan Warga Desa | Dari jurnal tersebut ditemukan bahwa dari Berbagai kebijakan pemerintah dalam upaya menghindarkan warga dari wabah penyakit corona nampak tidak berjalan efektif dan maksimal. Meski di Desa Labbo belum ditemukan kasus warga terpapar Covid-19, tetapi dengan minimnya kepatuhan warga menjalankan atau mengikuti protokol kesehatan sebagai upaya perlindungan dari paparan virus yang mana hal tersebut dikhawatirkan dapat membuat warga rentan menjadi obyek penularan. |
| 4 | (Megasari et al., 2020) | Upaya Memutus Penyebaran Virus Covid-19 Melalui Pembentukan Kampung Tangguh Semeru di Desa Tegalsari Kabupaten Malang | Kampung Tangguh Semeru adalah salah satu program Pemerintah untuk menghadapi wabah covid-19 dalam memutus mata rantai penyebaran Covid19 dari lingkup terkecil yaitu di tingkat desa. Harapannya program ini bisa merubah pola masyarakat untuk lebih peduli terhadap protokol kesehatan agar terhindar dari virus tersebut. Salah satu bentuk kegiatan di kampung tangguh diinisiasi oleh mahasiswa UM dengan memberikan sumbangsih tenaga, produk, dan juga edukasi. Produk yang diberikan kepada desa untuk menunjang kampung tangguh berupa 1000 masker, tempat cuci tangan, handsanitizer, tanaman toga. Serta mahasiswa UM melaksanakan kegiatan edukasi kepada masyarakat tentang new normal, bisnis di era new normal, serta protokol kesehatan yang tepat. |
| 5 | (Dimas et al., 2020) | Optimalisasi Peran Desa Dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Desa Prangko'an Kabupaten Magelang | Dalam artikel ditemukan bahwa peran desa dalam pencegahan covid 19 di desa Prangkoan adalah (1)Warga Desa Prangko'an telah mendapatkan informasi dan edukasi tentang bahaya virus Covid-19; (2) Warga Desa Prangko'an telah mendapatkan informasi dan edukasi tentang cara |

| | | | |
|---|--------------------------|--|---|
| | | | <p>pengecahan dan penanggulangan dari Covid-19; dan (3) Desa Prangko'an menjadi Desa Tanggap Covid-19 yang siap untuk menjaga warga masyarakatnya dari pandemi Covid-19</p> |
| 6 | (Mantiri & Lapian, 2021) | Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan | <p>Dalam artikel mengkaji terkait dengan Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1. Dalam penelitian peneliti mengkaji menggunakan teori menggunakan teori dari Edward III mengenai implementasi kebijakan sebagai berikut: 1 komunikasi, peneliti menilai bahwa proses komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa berjalan dengan baik dan juga dilaksanakan secara vertika dan horizionta. 2. Struktur organisasi, dimana di dengan pembentukan gugus tugas covid di setiap instasi pemerintah dari kabupaten sampai dengan diwilayah desa. 3 sumberdaya peneliti menilai bahwa fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah desa Ongkaw 1 antara lain, pos penjagaan, portal jalan, alat pengukur suhu tubuh, peralatan cuci tangan dan disinfektan, selain itu juga pemerintah memanfaatkan fasilitas desa lainnya seperti pengeras suara dan balai desa yang ada. Dalam hal fasilitas kesehatan, pemerintah desa memanfaatkan keberadaan puskesmas terdekat hal ini disebabkan jauhnya fasilitas rumah sakit yang hanya ada di daerah amurang. 4. Disposisi yang mana menunjukkan bahwa Sikap pelaksana dalam penanganan virus corona di Desa Ongkaw tergolong baik meskipun masih ada beberapa masyarakat yang masa bodoh dengan keadaan dan tidak mematuhi peraturan protocol kesehatan. Maka dari hasil tersebut disimpulkan bahwa iplementasi kebijakan penangan covid masih memiliki kekurangan pada sector sumberdaya dengan sikap masyarakat dalam menaatai peraturan.</p> |
| 7 | (Ardiputra et | Pembagian Masker Dan | Dalam artikel menjelaskan terkait |

| | | | |
|---|---|--|---|
| | al., 2020) | Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Rangka Mendukung Pencegahan Penyebaran Covid-19 Pada Masyarakat Desa Pallis Kecamatan Balanipa. | dengan kebijakan pemerintah dalam pembagian masker serta sosialisasi dengan upaya pencegahan penyebaran covid pada masyarakat desa Pallis. Hal ini didasari karena dikalangan masyarakat desa masih sering dijumpai ketidakpatuhan dalam menggunakan masker dalam melakukan aktifitas diluar sehingga dari hal tersebut sangat penting dilakukanya edukasi. Beberapa informasi yang di berikan dalam sosialisasi kebijakan pemerintah ini terdiri dari beberapa anjuran Pemerintah untuk memutus mata rantai penularan virus Corona. Imbauan tersebut terdiri dari menjaga jarak fisik (physical distancing), belajar di rumah, serta penggunaan masker saat beraktifitas diluar rumah . Hal itu terkait sifat virus Corona yang menular antar manusia. Penularan bisa terjadi melalui percikan. Itulah mengapa dalam sosialisasi ini diharapkan agar warga masyarakat tetap menjaga jarak fisik dengan sesamanya untuk meminimalisasi risiko terkena percikan (droplet), atau menyentuh benda yang sebelumnya terkena droplet serta kepatuhan akan penggunaan masker |
| 8 | (Erin Ayu Wulandari1, Afifuddin2, 2021) | Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Program Inovasi Desa (Pid) Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Desa Tirtoyudo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang) | Penelitian Dilakukan guna Mengetahui Kebijakan Pemerintah Desa Tirtoyudo Dalam Pengembangan Program Inovasi Desa (PID) Di Masa Pandemic Covid-19. Maka dalam penelitian memfokuskan pada penggunaan Dana Desa Untuk Kepentingan Kesejahteraan serta Pemberdayaan Masyarakat dan guna Pemerintah Desa Tirtoyudo Agar Lebih Memperhatikan Potensi-Potensi Yang Ada Di Desa Tirtoyudo Dan Melestarikannya. Maka dengan hadirnya kebijakan inovasi tersebut diharapkan mampu untuk mendorong masyarakat desa dalam pembanguna desa yang meliputi n Sumber Daya Manusia dapat digali, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, meningkatnya pendapatan Asli |

| | | | |
|----|--|--|---|
| 9 | (Ima Kumalasari, Slamaet muchsin2, 2021) | Efektivitas Strategi Penanganan Covid-19 Melalui Penerapan Kebijakan Kampung Tangguh Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Covid-19 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Studi Pada Kampung Cempluk, Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang) | Berdasarkan artikel ini dikatakan bahwa efektivitas dari penanganan covid 19 melalui penerapan kebijakan kampung tangguh berdasarkan Permendagri No. 20 tentang percepatan penanganan covid dapat dikatakan berhasil tepat. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengolaan kuisoner yang telah disebar oleh si peneliti. maka saran yang peneliti dapat berikan adalah diharapkan koordinasi dan sinergitas dalam penanganan covid-19 dapat dipertahankan hingga menunjukkan penurunan kasus terkonfirmasi di Desa Kalisongo, Kolaborasi aktif secara pentahelix ini harus mampu mempertahankan dan meningkatkan faktor kekuatan dan peluang dari kampung tangguh ini sendiri sehingga kedepannya terdapat upgrading sistem dari ketangguhan kampung tangguh yang lebih baik lagi. |
| 10 | (Rahmadi et al., 2021) | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedaung Kota Bandar Lampung Menuju Desa Tangguh Covid 19 | Dalam jurnal ini dikatakan bahwa partisipasi masyarakat menjadi kunci utama dalam penanganan wabah covid 19. Maka dengan itu diperlukan lah sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan adaptasi dan kebiasaan baru masyarakat ditengah pandemi covid19 serta sosialisai kepada tim Relawan covid di kalurahan Kedaung Kota Bandar Lampung. pemberian penyuluhan dan konsultasi kepada masyarakat terkait bahaya dan cara pencegahan covid 19. Serta yang terkahir pemberian stimulus untuk mengmebngan lagi progam guna memutus rantai covid. Sehingga dengan tiga hal tersebut diharapkan dapat mendorong tingkat partisipasi masyarakat menuju desa tangguh covid 19. |

Berdasarkan pada beberapa penelitian diatas, penulis lalu menarik kesimpulan bahwa focus dalam penelitian sebelumnya lebih mengarah pada penanganan covid 19 secara umum

yang dilakukukan oleh pemerintah Desa. Adapun terkait dengan penelitian diatas, penulis akan melakukan hal yang berbeda dengan kebanyakan penelitian sebelumnya dengan menambahkan pembaruan terkait dengan penangan covid yang berupa Evaluasi Kebijakan Pemerintah Desa Sumbermulyo Dalam Penyediaan *shelter* Sebagai Pencegahan dan Penanganan dalam Upaya Memutus rantai Penyebaran Covid 19.

F. Kerangka Dasar Teori

1. Evaluasi

William N Dunn (2003) menyamakan istilah evaluasi dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan pemberian nilai (assessment). Secara lebih spesifik William N Dunn mendefinisikan evaluasi sebagai bentuk penilaian sejauh mana hasil kebijakan dapat memberikan sumbangan pada tujuan dan sasaran kebijakan (Dunn, 2003).

Riant N Dwijowijoto (2003) menyatakan bahwa evaluasi digunakan untuk melihat sejauh mana tujuan dicapai, sejauh mana keefektifan kebijakan dapat dipertanggungjawabkan kepada konstituen, dan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan pencapaian. Kesenjangan antara harapan dan pencapaian bukan bertujuan untuk “menyalahkan”, tetapi harus dilihat secara positif sebagai kesempatan untuk memperbaiki atau mengurangi kesenjangan yang ada (Dwijowijoto, 2004). Mustopadijaja (2002) dalam (Widodo, 2007) menjelaskan secara lebih detail fenomena yang dinilai dalam evaluasi kebijakan atau program adalah tujuan, sasaran, kelompok sasaran, instrument kebijakan, respon dari lingkungan, kinerja, dan dampak kebijakan.

Evaluasi memiliki beberapa fungsi dalam analisis kebijakan yaitu (Dunn, 2003): Pertama, memberi informasi yang valid mengenai kinerja kebijakan. Kinerja kebijakan yang dimaksud adalah sejauh mana kebutuhan, nilai, tujuan, dan kesempatan telah berhasil dicapai. Secara

seederhana evaluasi berfungsi untuk menilai apakah kebijakan berhasil atau tidak. Kedua, memberikan klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target dalam kebijakan. Evaluasi memiliki fungsi untuk menguji kepantasan tujuan dan sasaran, mengapa tujuan dan sasaran tersebut yang dipilih untuk menyelesaikan masalah yang ada. 18 Ketiga, memberikan rumusan masalah dan rekomendasi ulang tentang kebijakan yang telah dievaluasi. Evaluasi dapat berfungsi untuk merumuskan alternatif kebijakan baru atau merevisi kebijakan yang sudah ada. Hal itu dapat dilakukan apabila kinerja kebijakan yang sudah ada tidak memadai atau tujuan dan target yang ada perlu didefinisikan ulang

Evaluasi secara sederhana dapat diartikan sebagai penilaian berhasil atau tidaknya sebuah kebijakan atau program. Untuk mengukur sebuah kebijakan tersebut berhasil atau tidak, dalam tahap evaluasi diperlukan sebuah kriteria penilaian. Berikut merupakan kriteria evaluasi menurut (Dunn, 2003) :

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang memiliki arti tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Efektifitas disebut juga hasil guna. Efektifitas bertujuan untuk melihat sejauh mana setiap alternatif kebijakan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Untuk menilai efektifitas bisa membandingkan tujuan awal dengan tujuan

yang berhasil dicapai. Efektivitas dapat diukur dari unit produk atau layanan sebuah kebijakan.

2. Efisiensi

Efektivitas dan efisiensi sangatlah berhubungan, sebab apabila kita berbicara tentang efisiensi tentunya kita membayangkan tentang hal penggunaan sumber daya (resources) kita secara optimal guna mencapai suatu tujuan tertentu. Maksudnya adalah efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimal sehingga suatu tujuan akan tercapai. Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu program atau kegiatan ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan terlampau besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini berarti kegiatan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.

3. Kecukupan

Kecukupan dapat dikatakan sebagai tujuan yang telah dicapai sudah dirasa mencukupi dalam berbagai hal. Dunn mengungkapkan bahwa sebuah kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa besar suatu tingkat efektivitas dapat memuaskan kebutuhan, kesempatan atau nilai yang menumbuhkan adanya masalah. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih

berhubungan dengan efektivitas dengan melihat atau juga memprediksi seberapa besar alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi pada masyarakat.

4. Pemerataan

Pemerataan dalam program atau kegiatan dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan (equity) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompokkelompok yang berbeda dalam masyarakat. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya dan manfaatnya merata. Kunci dari suatu pemerataan adalah keadilan atau kewajaran.

5. Responsivitas

Responsivitas dapat diartikan sebagai respons dari suatu aktivitas baik yang telah dilaksanakan maupun tahap perencanaan. Menurut Dunn menyatakan bahwa responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Suatu keberhasilan kegiatan dapat dilihat melalui

tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kegiatan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kegiatan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan.

6. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Ketepatan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya (bila ada). Misalnya dampak lain yang tidak mampu diperkirakan sebelumnya, baik itu dampak tak terduga secara positif maupun negatif atau juga dimungkinkan alternatif lain yang dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis.

2. Kebijakan Public

Kebijakan public merupakan suatu jalan guna mencapai suatu tujuan yang kita cita citakan. Menurut Carl Federick sebagaimana di kutip dalam Leo Agustino mengatakan bahwa kebijakan public merupakan suatu rangkaian sebuah tindakan ataupun aktivitas yang diusulkan seseorang, kelompok, organisasi, atau pemerintah dalam suatu tempat atau lingkungan tertentu yang mana terdapat suatu hambatan atau kesulitan

serta kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan guna mencapai suatu tujuan. Maka dengan pendapat ini dapat dikatakan bahwa suatu ide kebijakan akan melibatkan pelaku yang memiliki maksud dan tujuan.

Sedangkan menurut Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008 : 6) mengartikan bahwa kebijakan public merupakan suatu hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Namun pendapat tersebut menurut para ahli dianggap masih terlalu luas untuk dikatakan sebagai salah satu definisi dari kebijakan public.

Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) kebijakan public dapat didefinisikan sebagai aktivitas atau kegiatan suatu pemerintah dalam memecahkan suatu permasalahan yang sedang dialaminya baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari pengertian tersebut dapat kita artikan bahwa kebijakan merupakan suatu tindak yang muncul ketika terjadi permasalahan serta berfungsi untuk menyudahi masalah tersebut.

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dalam dikutip Budi Winarno (2007: 32-34) adalah sebagai berikut

A. Tahap penyusunan agenda

Pada tahap ini adalah awal proses perumusan suatu masalah menjadi suatu kebijakan public. Dimana pada tahap ini akan suatu pemilihan permasalahan yang akan di angkat sebagai focus pembahasan kebijakan.

B. Tahap Formulasi Kebijakan

Pada tahap yang kedua ketika ketika suatu permasalahan telah masuk kedalam agenda maka dibahaslah oleh para pembuat kebijakan. Dalam tahap ini adalah guna mencari suatu jalan keluar dalam suatu masalah yang telah diambil.

C. Tahap adopsi kebijakan

Ketika sudah munculnya berbagai jalan keluar dari permasalahan maka hanya akan diambil satu yang terbaik oleh pembuat kebijakan. Hingga pada hanya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas 21 legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

D. Tahap implementasi kebijakan

Dan yang ke empat adalah tahap implementasi kebijakan dimana dalam hal ini kebijakana yang sudah diambil akan dilaksanakan oleh beberapa unit-unit administrasi yang berkepentingan.

E. Tahap Evaluasi Kebijakan

Dan yang terakhir adalah tahap evaluasi yang mana dalam tahap ini guna melihat sejauh mana kebijakana yang dibuat terhadap dampak yang diinginkan. Atau sejauh mana dampak dari kebijakana ini terhadap masyarakat atau permasalahannya.

3. Pemerintah desa

Pemerintah Desa merupakan suatu penyelenggara dalam bidang pemerintahan serta kepentingan rakyat umum yang bertempat pada

wilayah tersebut. Dapat dikatakan desa karena memiliki system pemerintahannya sendiri yang mana dinamakan pemerintah Desa. Didalam Pemerintah Desa berisikan kepala Desa yang dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggarakan dalam pemerintahan Desa. Menurut Soemantri (2010:7) pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, sedangkan perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksanaan teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Bab I pasal 1 menyebutkan bahwa, “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia”. Dengan kata lain, Pemerintah Desa merupakan satuan organisasi paling terendah yang juga kepanjangan tangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang berdasarkan asas dekonsentrasi yang kedudukannya dibawah Pemerintah Kecamatan, dan bertanggungjawab langsung terhadap perintah dari Pemerintah Kecamatan. Pemerintah Desa merupakan unsur penyelenggara seluruh aspek pemerintahan di Desa.

Pemerintahan Desa merupakan suatu sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa atau yang biasa disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa serta Perangkat Desa sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa (Hendro Pujo S. A., 2013:1376).

Menurut Heriyanto (2015) Pemerintah Desa merupakan organisasi dari penyelenggaraan yang mana terdiri dari :

A. Kepala Desa

Kepala desa merupakan suatu pimpinan tertinggi didalam suatu penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan dalam pembangunan demi kemajuan Desa, pembinaan serta pemberdayaan terhadap masyarakat Desa. Yang mana kepala Desa memiliki unsur peran yang begitu penting dalam proses pemerintahan desa.

B. Perangkat Desa

Perangkat desa merupakan suatu perangkat yang bertugas untuk membantu kepala Desa dalam menjalankan tugas serta wewenangnya dan dalam menjalankan tugasnya perangkat desa bertanggungjawab

langsung kepada Kepala Desa. Perangkat desa terdiri dari sebagai berikut :

a. Sekertaris Desa

Sekertaris Desa atau biasa kita sebut dengan carik merupakan staf desa yang bertugas untuk membantu kepala Desa dengan jabatan dibawah kepala Desa.

b. Pelaksanaan kewilayahan

Pelaksanaan kewilayahan ialah staf yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bagian kewilayahan.

c. Pelaksanaan teknis

Pelaksanaan teknis merupakan staf yang bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam operasional terhadap desa dan masyarakat.

C. Badan Permusyawara Desa

Badan Permusyawara Desa adalah wujud dari system demokrasi yang berada pada suatu pemerintah Desa. BPD merupakan badan yang bertugas untuk mengawasi terhadap kinerja dari kepala Desa serta guna menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan yang terakhir untuk membahas juga menyepakati sebuah rancangan peraturan desa bersama kepala Desa.

G. Definisi Konseptual

1. Evaluasi

Evaluasi merupakan suatu proses penilaian secara sistematis sejauh mana sebuah kebijakan atau program dapat mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan sasaran. Fungsi evaluasi bukan hanya untuk membuktikan (to prove) sebuah program berhasil atau gagal, tetapi untuk memperbaiki (to improve) program.

2. Kebijakan Public

Kebijakan public merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi yang bertujuan untuk mencari suatu alternative guna keluar dari suatu permasalahan yang sedang dihadapinya.

3. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa merupakan satuan oragnisais dengan tingkat paling rendah dalam suatu pemerintahan dalam Negara yang mana membawai masyarakat secara langsung tanpa adanya perantara sehingga pemrintah desa sebagai penyelenggara

H. Definisi Operasional

Definisi Operasional Menurut William N. Dunn

| No. | Tujuan | Variable | Indikator | Parameter |
|-----|---|-------------|-------------|--|
| 1 | Evaluasi penyediaan shalter sebagai upaya penanganan Covid-19 | Efektivitas | Tujuan | 1. Tujuan awal dengan tujuan yang sudah di capai |
| | | Efisiensi | SDM | 1. Sumberdaya manusia yaitu stakeholder yang terlibat dalam penyediaan shalter desa Sumbermulyo. |
| | | | Anggaran | 1. Sumber pendanaan Shalter Desa Sumbermulyo 2. Kesesuaian antara anggaran dan pengeluaran |
| | | Kecukupan | Pelaksanaan | 1. Sarana dan prasarana 2. Teratasi permasalahan isolasi masyarakat Sumbermulyo |
| | | Pemerataan | Sasaran | 1. Pemerataan kebijakan penyediaan shalter 2. Pemerataan informasi untuk melakukan |

| | | | | |
|--|--|----------------|--------------|--|
| | | | | isolasi di shalter bagi warga yang positif covid 19. |
| | | Responstivitas | Dampak | 1. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat terhadap kebijakan penyediaan shalter desa Sumbermulyo. |
| | | | Tanggapan | 1. Tanggapan masyarakat desa Sumbermulyo terkait dengan fasilitas dan sarana dan prasarana. 2. Terdapat kerja sama antara pemerintah Desa Sumbermulyo dengan LSM atau pihak swasta dalam pelaksanaan progam penyediaan shalter. |
| | | Ketepatan | Keberhasilan | 1. Terdapat penurunan kasus covid didesa Sumbermulyo. |

I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang sistematis guna menyusun ilmu pengetahuan (Suryana, 2010). Pada dasarnya penelitian digunakan untuk menunjukkan kebenaran dan pemecahan masalah atas apa yang menjadi kajian penelitian untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk

mendekati permasalahan yang diteliti dan menemukan jawabannya diperlukan suatu metode penelitian yang memadai. Maka dalam Penelitian ini secara spesifik akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengertiannya penelitian metode kualitatif sendiri menurut Denzin & Lincoln (2011: 3-4) dalam (Ridho Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Muhammad Eko Atmojo, 2020) adalah suatu upaya dalam melakukan penafsiran, interpretasi, dan rasionalisasi terhadap realitas kehidupan berdasarkan dengan yang diteliti oleh seorang peneliti. Kemudian dalam penelitian ini akan mengungkap mengenai realita atau kejadian yang ada sesungguhnya, maka dengan hal tersebut itu peneliti akan memilih pendekatan dengan studi kasus. Menurut (Creswell, 2014) pendekatan studi kasus menempatkan peneliti untuk dapat mengungkap dengan cermat dan teliti mengenai suatu proses, peristiwa, kegiatan, aktivitas, ataupun program sebagai upaya dari penelitian yang dijalankannya.

1.1. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini peneliti akan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dengan menggunakan metode kualitatif, sang peneliti diharapkan dapat mencerna serta memahami indikasi dari permasalahan yang ditelitinya (Soerjono Soekanto, 1982 : 32). Pada selanjutnya, pendekatan yang kami lakukan yaitu dengan pendekatan deskriptif, dan studi kasus. Pendekatan deskriptif merupakan sebuah metode penelitian yang menjelaskan sebuah peristiwa yang masih terjadi sampai saat ini ataupun waktu lampau (Sujana dan Ibrahim, 1989 : 65). Menurut Faisal (1992:18) metode penelitian deskriptif

dimaksudkan sebagai suatu upaya eksplorasi dan kuantifikasi tentang bentuk fenomena sosial yang terjadi. Penelitian kualitatif merupakan suatu metode yang berusaha guna memecahkan masalah yang dihadapi pada situasi sekarang. Penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang tidak dapat dicapai hasilnya melalui prosedur statistik atau melalui cara-cara dari kuantifikasi atau (pengakuan).

1.2 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini sendiri akan dilakukan di Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk alasan pemilihan lokasi tersebut didasari dari berbagai alasan antara lain adalah karena tingginya kasus covid di Desa Sumbermulyo yang terjadi pada tahun 2021, Serta Desa Sumbermulyo sendiri menjadi Desa yang pertama kali membangun shelter covid19 sekabupaten Bantul. Oleh sebab itu Desa Sumbermulyo menjadi desa percontohan penanganan covid yang mana diberikan dari kementerian Kesehatan. Untuk titik pengambilan data penelitian sendiri yaitu kantor Pemerintah Desa Sumbermulyo.

1.3. Jenis Data

a. Data Primer

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan jenis data primer. Data primer sendiri yang digunakan berupa hasil dari wawancara dengan kepala Desa Sumbermulyo, kepala Koordinator

lapangan Shalter Desa Sumbermuyo, Satgas Covid Desa, kepala puskesmas, serta masyarakat yang menjalani isolasi shalter ataupun secara mandiri. Dengan hal bermaksud untuk melihat seberapa berjalanya penyediaan shalter di Desa Sumbermuyo serta faktor-faktor apa sajakah yang membuat masyarakat memilih melakukan isolasi ataupun isolasi Shalter.

b. Data Skunder

Dalam pemelitan ini peneliti juga akan menggunakan data jenis skunder. Yang mana data skunder dapat diperoleh dari berbagai sumber sumber seperti buku, jurnal, serta melalui surat kabar yang masih berkaitan dengan pokok penelitian yang digunakan. Data skunder untuk penelitian akan didapat dari dokumen maupun jurnal serta Media yang memiliki keterkaitan dengan upaya pemerintah desa dalam penanganan serta memutus rantai penyebaran covid 19.

I. Tabel Data Sekunder

| No | Jenis Data | Sumber |
|----|---------------|---|
| 1 | Data Sekunder | Dokumen dokumen yang diperoleh dari Kantor Desa Sumbermulyo atau Website milik Pemerintah Desa Sumbermulyo yang Berkaitan dengan kebijakan Shalter Desa serta kasus covid desa Sumberulyo |
| | | Peraturan Bupati No 6 tahun 2021 |
| | | Peraturan Bupati Nomor 106 tahun 2020. |

| | | |
|--|--|--|
| | | Laman berita yang berkaitan dengan penyediaan shalter Covid Desa Sumbermulyo |
|--|--|--|

1.4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu langkah yang paling strategis dan utama dalam suatu penelitian, karena tujuan dari penelitian itu sendiri adalah tentang mendapatkan data (Sugiyono,2015). Karena dengan tanpa adanya teknik pengumpulan data maka peneliti diyakini tidak akan memperoleh atau mendapatkan data yang standar untuk penelitian. Berikut merupakan teknik pengumpulan data :

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yang berupa datang langsung atau secara langsung melihat kondis lapangan yang akan digunakan untuk penelitian kemudian mencatat secara sistematis terkait subyek dan obyek yang sudah diamati. Maka dengan hal ini peneliti akan mengamati hal hal yang terkait dengan pelaksanaan shalter covid -19 di Desa Sumbermulyo baik secara lokasi serta sarana dan prasarana .

b. Wawancara

wawancara merupakan percakapan dengan tujuan tertentu. Dalam sebuah wawancara dilakukan oleh dua pihak yaitu adalah pihak pewawancara yang memberikan pertanyaan dan terwawancara atau yang memberikan tanggapan atas pertanyaan yang sedang diberikan (Moleong,2017). Dalam wawancara ini menggunakan pihak pihak informann yang sudah dutetapkan sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai bahan acuan. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa tokoh yang akan diwawancarai terkait focus dalam penelitian.

| Irfoman | Jabatan |
|--|---|
| Pemerintah Desa Sumbermulyo | Kepala Desa Sumbermulyo |
| Rumah Sakit Lapangan Kusus Covid Bantul 2021 | Kepala Rumah Sakit |
| Satgas covid | Kepala Koordinator lapangan Shelter Desa Sumbermulyo |
| | Satgas Covid Kalurahan Sumbermulyo |
| 6 Masyarakat di kalurahan Sumbermulyo | 6 masyarakat Kalurahan Sumbermulyo |

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara untuk mencari data berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, website, jurnal, ataupun peraturan perundang-undangan dsb (Arikunto, 2006).

Studi dokumentasi ini dijadikan sebagai pelengkap dari metode observasi, serta wawancara pada penelitian kualitatif (Sugiyono,2016). Serta dokumentasi yang diambil selama olah data yang telah dilakukan. Maka dengan itu peneliti akan menggunakan data sekunder baik dari website Desa Sumbermulyo , kabar Berita yang berkaitan dengan penanganan covid Desa Sumbermulyo melalui shalter desa, Perundang-undangan yang berkaitan dengan shalter desa Sumbermulyo.

J. Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan penelitian yang mana merupakan proses dalam penyusunan serta pengeloaan data yang menggunakan penafsiran data dan telah diperoleh. Menurut Sugiyono(2015) analisis data merupakan suatu kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain yang sudah terkumpul. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini berupa teknik Triangulasi. Teknik Triangulasi merupakan model pengumpulan data dengan memperoleh hasil dengan melalui pengambilan data yang telah ada dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahap penelitian. Dalam teknik analisis data meliputi beberapa hal yaitu sebagai berikut : pengumpulan data, reduksi data, serta penyajian data yang telah didapatkan.

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan Data Merupakan tahap sistematis guna mendapatkan data yang akan dibutuhkan baik data primer maupun data Sekunder. Cara pengumpulan data selalu berhubungan dengan masalah penelitian yang

ingin dipecahkan. Pada tahap ini akan menggabungkan berapa data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu proses pemilihan, pemfokusan perhatian hingga penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis yang ada di lapangan. Dalam hal ini akan dilakukan secara terus menerus selama kegiatan penelitian ini berlangsung. Maksud dari reduksi data ini adalah tahap merangkum serta memilih hal-hal yang penting agar dapat lebih focus terhadap permasalahan yang akan diteliti. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi yakni membuat ringkasan, menelusuri tema, menulis memo.

c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sebuah tahap setelah reduksi data yang mana merupakan sekumpulan informasi yang tersusun serta memberi kemungkina dengan adanya penarikan kesimpulan. Tahap ini dilakukan oleh si peneliti guna memperoleh data dalam penelitian kualitatif yang mana berbentuk narasi sehingga perlu penyederhanaan tanpa dengan mengurangi isinya.

d. Penarikan Kesimpulan

Dan yang terakhir adalah tahap penarikan kesimpulan yang mana ditandai dengan penarikan data yang telah ditampilkan sejauh pemahaman dan interpretasi peneliti. Pada tahap ini penelitian akan

mengemukakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian lapangan. Pemeriksaan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu merupakan teknik perbandingan informasi dari informan yang satu dengan informan yang lain atau bias kita katakan dengan membandingkan data yang lapangan serta data yang ada.